

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

DKI Mengklaim Perluasan Ancol untuk Publik

Salah satu peruntukan penggunaan lahan museum sejarah Nabi Muhammad SAW.

Inge Klara Safitri

inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA – Pemerintah DKI Jakarta akhirnya angkat suara soal pemberian izin ekspansi area Taman Impian Jaya Ancol. Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah menyatakan izin perluasan lahan Ancol dan Dufan dikeluarkan demi kepentingan publik. Sebab, hasil perluasan lahan itu akan digunakan untuk tempat rekreasi warga, tempat bermain anak, dan pembangunan museum sejarah Nabi Muhammad SAW.

Tanah yang digunakan untuk menimbun laut pun, Saefullah melanjutkan, memanfaatkan sisa pengerukan lima waduk dan 13 sungai dalam program Jakarta Emergency Dredging Initiative yang berlangsung sejak 2009. Berdasarkan laporan dalam Proyek Darurat Penanggulangan Banjir Jakarta itu, total hasil pengerukan waduk dan sungai di Jakarta selama 11 tahun

terakhir mencapai sekitar 3,4 juta meter kubik.

"Tanah kerukan itulah yang akan dimanfaatkan supaya tidak terececer tak beraturan di pantai utara Jakarta dan menimbulkan masalah lingkungan," ujar Saefullah, akhir pekan lalu. Ke depannya, perluasan lahan tetap memanfaatkan tanah hasil pengerukan di sejumlah proyek di Jakarta, termasuk pembangunan MRT.

Perluasan lahan Ancol mendapat sorotan setelah Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020. Berdasarkan surat yang dilansir pada Februari

lalu tersebut, kawasan hiburan di Jakarta Utara itu boleh berekspansi 155 hektare lewat penimbunan laut. Aktivis lingkungan menuding hal tersebut melanggar janji kampanye Anies untuk menghentikan reklamasi.

Saefullah mengklaim perluasan lahan untuk Dunia Fantasi dan Ancol Timur tak akan mengancam pencarian nelayan. Ini pertama kalinya DKI memberikan pernyataan resmi sejak izin perluasan Ancol menjadi polemik dua pekan lalu.

Menurut Saefullah, lokasi di tengah pesisir utara Jakarta itu tidak bersinggungan dengan aktivitas penangkapan dan budi daya ikan. Dia juga memastikan penumpukan lumpur hasil pengerukan sungai tersebut tidak berdampak buruk bagi lingkungan. DKI telah meminta PT Pembangunan Jaya Ancol melakukan sejumlah kajian teknis. "Misalnya kajian penanggulangan dampak banjir, kajian pemanasan global, dan kajian perencanaan pengambilan material

perluasan kawasan," kata Saefullah.

Kewajiban tersebut tertera dalam Keputusan Gubernur tentang Perluasan Ancol. Isi warkat itu mewajibkan pengelola Ancol menyediakan utilitas dasar; angkutan umum, ruang terbuka hijau dan biru, sampai infrastruktur pengendali banjir dan pengelolaan limbah. Jika dalam tiga tahun syarat-syarat itu belum dikerjakan, izin bakal ditinjau kembali.

Elisa Sutanudjaja, Direktur Pelaksana Rujak Center for Urban Studies, tidak puas atas penjelasan Saefullah. Menurut dia, Sekretaris Daerah tidak menjawab soal alasan DKI memberi izin reklamasi yang luasnya setara dengan 1,5 kali luas kawasan Monas tersebut. Elisa mengatakan masalah tidak akan muncul kalau izin diberikan semata pada 20 hektare lahan yang sudah telanjur terbentuk di Ancol Timur. "Tapi luasannya jangan berkali-kali lipat seperti ini, dong," kata dia.

● INGE KLARA SAFITRI

